



## ***MINUTES OF MEETING***

### ***KICK OFF MEETING***

#### ***INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN***

Tanggal : 7 Juni 2018  
Tempat : Hotel Grand Mahakam, Kota Jakarta Selatan  
Peserta :

- **Pemerintah**
  - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
    - Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
    - Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW
    - Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW
    - Perwakilan Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah; Direktorat Jenderal Bina Marga
  - Perwakilan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Ekonomi; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  - Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata; Bidang Koordinasi Infrastruktur; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
  - Direktur Pelayanan dan Perencanaan Wilayah, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - Perwakilan Badan Otorita Borobudur
  - Perwakilan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
  - Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
- **The World Bank Team**
- **Tim Konsultan Penyusun ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

#### **A. PEMBUKAAN DAN ARAHAN**

**Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP**

**Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian PUPR**

1. Isu Strategis Pengembangan Kepariwisata:
  - a. Berdasarkan hasil proyeksi peningkatan pendapatan dari beberapa sektor, sektor pariwisata diproyeksi merupakan sektor penghasil pendapatan tertinggi pada tahun 2017-2019.
  - b. Indonesia memiliki angka pertumbuhan kedatangan turis asing yang lebih tinggi (25,68%) apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kedatangan turis asing di ASEAN (7%) dan di dunia (6%).
  - c. Sejak tahun 2008 hingga 2017, peringkat dan Indeks Pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Indonesia berada di peringkat 42 dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
2. Tantangan Pembangunan Nasional:
  - a. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh tinggi, disparitas antar daerah masih tinggi. Angka kemiskinan dan pengangguran pun masih perlu ditekan. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan dan pengangguran Nasional secara berturut-turut adalah 11,22% dan 5,81%.

- Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas merupakan pilihan yang strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan.
- b. Indonesia harus terus meningkatkan dukungannya terhadap dunia usaha mengingat Indonesia merupakan negara teratas dalam *Top Reformer* bagi perbaikan Kemudahan Berusaha (Survei EoDB, 2018).
3. Dukungan Pembangunan Infrastruktur:  
Hingga tahun 2019, Kementerian PUPR memiliki target pembangunan pada Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan.
    - a. Pada Sektor Bina Marga; dukungan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyebrangan di 60 lokasi, jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar, 15 kawasan industri prioritas, kawasan pariwisata pada 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 15 bandar udara baru, dan intermoda dengan jalur kereta api.
    - b. Sedangkan dukungan pada Sektor Sumber Daya Air; dukungan yang diberikan berupa pembangunan waduk, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai, pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan/peningkatan pengelolaan air baku.
    - c. Dukungan dari Sektor Cipta Karya dapat mendukung dalam pencapaian target akhir pada tahun 2019 berupa 100% akses air minum layak, 0 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan 100% akses sanitasi layak.
    - d. Dukungan pada Sektor Perumahan berupa fasilitasi sarana dan prasarana untuk pembangunan rumah umum tapak layak huni, pembangunan rumah susun untuk MBR, serta bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya.
  4. Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kepariwisata di Indonesia:
    - a. Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
      - Pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019 difokuskan pada 35 WPS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.
      - Dalam melakukan pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan pengembangan wilayah, diperlukan keterpaduan perencanaan infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS, sinkronisasi program antar infrastruktur (fungsi, lokasi, waktu, besar, dana), serta koordinasi-sinkronisasi dalam pelaksanaan program.
    - b. Dalam rangka integrasi pengembangan sektor nasional, Kementerian PUPR melakukan dukungan terhadap 12 kawasan metropolitan, 13 kota baru, 20 Kawasan Industri (KI), 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 40 Kawasan Perdesaan Strategis Nasional, 18 provinsi lumbung pangan, konektivitas multimoda, serta perbatasan nasional di beberapa pulau dan 10 PKSN.
    - c. Keterpaduan perencanaan pengembangan KSPN dapat dilakukan dengan cara membuat konsensus pemangku kepentingan pada seluruh level, menentukan objek dan tujuan prioritas KSPN, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, optimalisasi kapasitas kawasan, dan mempersiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu untuk kawasan pariwisata strategis dengan mencakup 3A (aksesibilitas, amenitas, dan atraksi).
    - d. Sedangkan untuk keterpaduan antarsektor untuk KSPN dapat dilakukan dengan menyiapkan *readiness criteria* untuk investasi, menyediakan skema keuangan yang berkelanjutan untuk investasi pariwisata, membiayai pembangunan fisik, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkembang, dan mendorong peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di sektor kepariwisataan.
  5. Strategi Keterpaduan Pengembangan Kepariwisata di Indonesia:
    - a. Salah satu strategi dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah dengan melalui penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP). Fokus penyusunan ITMP yaitu di Pulau Lombok, Kawasan Danau Toba, serta Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
    - b. Keterpaduan penyusunan ITMP dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas institusi untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata, mendorong

partisipasi lokal dalam perekonomian pariwisata, serta meningkatkan lingkungan yang mendukung untuk masuknya investasi swasta dan bisnis di sektor pariwisata.

## **B. SESI PRESENTASI OLEH NARASUMBER**

- 1. Narasumber : Bapak I. Angger Anindito**  
**Instansi : Perwakilan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Ekonomi; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

**Materi yang disampaikan :**

- a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sedang disusun oleh Bappenas dan akan menjadi input penyusunan program seluruh K/L. RKP 2019 juga akan menjadi penutup kabinet 2015-2019. Sesuai dengan tema kabinet, maka tujuan utama RKP masih terkait pembangunan infrastruktur.
- b. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara 2017 meningkat. Rata-rata lama tinggal juga meningkat, namun penerimaan devisa dan pengeluaran wisman per hari mengalami penurunan. Dibutuhkan kebijakan terkait inovasi produk lokal dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan rata-rata belanja wisata.
- c. Dibandingkan dengan negara tetangga, pertumbuhan jumlah wisata di Indonesia tidak sebanding apabila dilihat dari jumlah destinasi, luas daerah, serta populasi Negara Indonesia yang jauh lebih tinggi.
- d. Wisatawan mancanegara masuk melalui tiga pintu utama (gerbang) pariwisata internasional yaitu Bandara Ngurah Rai, Bandara Soekarno-Hatta, dan Kota Batam. Angka wisatawan yang masuk melalui bandara lainnya masih relatif rendah.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menjelaskan penguatan perencanaan dan penganggaran yang awalnya menitikberatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun saat ini mulai mengintegrasikan beberapa sumber-sumber pendanaan, misalnya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA). Kawasan pariwisata dapat dipertimbangkan untuk menggunakan skema KPBU.

- 2. Narasumber : Bapak Hengki H. P. Manurung**  
**Instansi : Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata**

**Materi yang disampaikan :**

- a. Sektor pariwisata baru diusung oleh kabinet 2015-2019 untuk dijadikan sebagai sektor pengembangan utama. Tantangannya adalah bagaimana membuat pengembangan yang terintegrasi dan lebih baik dari era pemerintahan terdahulu.
- b. Pembaruan Kebijakan:
  - i. Dalam menarik wisatawan dan investor, dalam deregulasi, Indonesia fokus pada dua hal yaitu kemudahan masuk ke Indonesia serta kemudahan dalam berbisnis.
  - ii. Terdapat tiga deregulasi terkait kemudahan untuk masuk ke Indonesia yaitu visa gratis, menyederhanakan kedatangan kapal pesiar, dan penghapusan prinsip *cabotage* pelayaran.
  - iii. Dampak dari deregulasi kemudahan dalam berusaha, lebih dari 90% bisnis kepariwisataan terbuka untuk *Foreign Direct Investment* (FDI) (52 dari 57).
- c. Peluang Investasi
  - i. Realisasi investasi pada sektor pariwisata di Bulan Januari-September 2017 mencapai USD 1.788 Juta atau 102% dari target pada tahun 2017.
  - ii. Lima provinsi dengan tingkat realisasi investasi asing pada tahun 2017 tertinggi secara berturut-turut adalah Bali, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan lima provinsi dengan tingkat realisasi

investasi dalam negeri pada tahun 2017 yang tertinggi secara berturut-turut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali.

iii. Tiga alasan mengapa investasi pada sektor pariwisata di Indonesia menguntungkan adalah daya beli tinggi, insentif investasi tinggi, dan nilai investasi tinggi.

d. Berikut adalah isu penghambat investasi pada sektor pariwisata beserta tindak lanjutnya.

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Konsep perijinan yang menjadi prinsip dari kebijakan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari upaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah sebesar-besarnya.	Identifikasi perda-perda yang menerapkan perpanjangan izin pariwisata di daerah dan menelaah payung hukung yang dijadikan dasar perda tersebut
2	Tingginya pungutan daerah untuk usaha pariwisata, berupa pajak pembangunan daerah (PB1) sebesar 10%. untuk makanan, minuman, dan penginapan, dan pajak daerah hingga 70% untuk usaha hiburan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan pengurangan Pajak pembangunan daerah (PB1) dengan mempertimbangan dampak yang dihasilkan (peningkatan jumlah realisasi investasi pariwisata dan peningkatan jumlah penggunaan tenaga kerja)</li> <li>• Memberikan pemahaman kepada perumus kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mendukung dalam meningkatkan jumlah wisman, wisnus, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>
3	Pertentangan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk untuk distandardisasi.	Pertimbangan untuk merevisi PP No. 52 Tahun 2012 dengan menambahkan skema pelaksanaan sertifikasi salah satunya dengan sistem <i>online</i> .
4	Adanya perbedaan definisi dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Pariwisata (KBLI) yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah (Perda).	Merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat mengenai definisi dan KBLI sektor pariwisata untuk dapat digunakan sebagai acuan PTSP daerah dalam melaksanakan perizinan di daerah.
5	Proses perizinan pengusulan KEK yang memakan waktu panjang.	Diperlukan kajian khusus untuk dapat memeberikan solusi berupa terobosan percepatan penetapan KEK
6	Perbedaan kebijakan yang mengatur penggunaan genset untuk usaha pariwisata.	Memberikan masukan / rekomendasi kepada Kemen ESDM yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk usaha pariwisata yang tidak mendapatkan fasilitas listrik dari PLN, diberikan kebebasan untuk mengupayakan secara swakelola melalui penyediaan genset dan</li> <li>• Untuk usaha pariwisata yang mendapat fasilitas listrik dari PLN, hanya boleh menggunakan genset pada saat emergency seperti ketika ada pemadaman listrik dari PLN.</li> </ul>

3. **Narasumber** : **Bapak Fritz H. S.**  
**Instansi** : **Direktur Pelayanan dan Perencanaan Wilayah, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal**

**Materi yang disampaikan** :

- a. *Added value* di daerah tujuan wisata bisa menambah jangka waktu kunjungan yang sekarang menjadi permasalahan yang harus kita sadari bahwa *spent time* wisatawan cukup rendah karena objek pariwisata yang terbatas
- b. Informasi dan Teknologi (IT) dan pariwisata memiliki peluang investasi yang sangat besar dan memberikan nilai balik investasi yang tinggi.
- c. Apabila kawasan tertentu memiliki *master plan*, maka IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang disusun bisa menjadi bahan promosi. Promosi bukan hanya terkait iklim investasi. Melalui IPRO pemerintah dapat menggambarkan kepada calon investor terkait rencana pengembangan investasi yang lebih mendetil di suatu Kawasan
- d. *Market sounding* yang baik akan mempengaruhi calon investor dengan cara langsung yaitu mengenalkan proyek secara riil, sekaligus mempromosikan wisata yang ada di sana

4. **Narasumber** : **Bertine Kamphuis**  
**Instansi** : **Task Team Leader, World Bank**

**Materi yang disampaikan** :

- a. Pariwisata dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk menumbuhkan dan membuka lapangan pekerjaan di luar sektor komoditas.
- b. Empat kendala utama untuk membuka kunci pengembangan pariwisata di Indonesia adalah sebagai berikut.
  - i. Lemahnya koordinasi dan kemampuan implementasi untuk pengembangan pariwisata dan pemantauan dan pelestarian aset.
  - ii. Akses dan kualitas yang buruk dari infrastruktur dan layanan untuk warga, pengunjung, dan dunia usaha.
  - iii. Di luar Bali, keterampilan tenaga kerja pariwisata yang terbatas dan layanan dan fasilitas pariwisata sektor swasta.
  - iv. Lemahnya lingkungan yang mendukung untuk investasi swasta dan pemasukan bisnis.
- c. Diperlukan untuk membuat *platform* yang dapat digunakan untuk kolaborasi antar pemangku kepentingan, salah satunya melalui *Indonesia Tourism Development Program (ITDP)*.
- d. Terdapat empat komponen pada ITDP yang dapat mengatasi kendala utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia yaitu sebagai berikut.
  - i. Komponen 1: Meningkatkan kapasitas institusi untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
  - ii. Komponen 2: Meningkatkan aksesibilitas terhadap jalan serta sarana dan prasarana yang menunjang pariwisata.
  - iii. Komponen 3: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi kepariwisataan.
  - iv. Komponen 4: Meningkatkan lingkungan yang berpotensi untuk investasi swasta dan masuknya bisnis dalam pariwisata.
- e. Proyek *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* ini menggunakan berbagai sumber pendanaan seperti APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pinjaman.

5. **Narasumber** : **Ir. Hadi Sucahyono, MPP, M.Sc., Ph.D.**  
**Instansi** : **Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian PUPR**

**Materi yang disampaikan** :

- a. Salah satu prasyarat dilakukannya *Indonesia Tourism Development Program* (ITDP) sebagai induk dari ITMP adalah adanya kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Management Framework* (ESMF)). Dokumen ini mencakup:
  - i. tinjauan karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya pada setiap kawasan terpilih (Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan);
  - ii. penentuan kebijakan yang paling tepat untuk diaplikasikan;
  - iii. mempersiapkan model *Term of Reference* (ToR), arahan terkait *Feasibility Study* (FS) dan *Detailed Engineering Design* (DED) turunan, mengembangkan *screening methodology* dan *checklist* untuk digunakan dalam implementasi ESMF;
  - iv. implementasi pengembangan kapasitas dalam ESMF; dan
  - v. konsultasi publik di tingkat nasional (pusat) dan tiga destinasi.
- b. Lingkup pekerjaan kegiatan penyusunan ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah sebagai berikut.
  - i. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan, serta kebijakan
  - ii. Analisis permintaan dan potensi di area pengembangan pariwisata
  - iii. Analisis kondisi dasar dari rencana tata ruang, selisih penyediaan dan kebutuhan infrastruktur dan atraksi, serta fasilitas
  - iv. Penyiapan dalam proyeksi pertumbuhan dan skenario pengembangan
  - v. Pendetailan skenario pengembangan terpilih
  - vi. Formulasi ITMP (termasuk Rencana Manajemen Pengunjung (*Visitor Management Plan*)) untuk Candi Borobudur dan sekitarnya.
  - vii. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan
- c. Selain menjahit infrastruktur, tim konsultan bersama dengan pemerintah juga bertanggungjawab membentuk SDM dan mendukung peningkatan investasi. Membuat perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka Panjang.

6. **Narasumber** : **Tim Konsultan Penyusun ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

**Materi yang disampaikan** :

- a. Pariwisata merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu investasi pada sektor pariwisata sangat menguntungkan.
- b. Alasan diperlukannya integrasi pada sektor pariwisata adalah karena pariwisata merupakan aktivitas yang rumit. Pariwisata bukan hanya sekedar hotel, transportasi, alam, dan budaya.
- c. Harus dipastikan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki rasa kepemilikan terhadap ITMP.
- d. Dalam pengerjaan ITMP, praktik terbaik dari pengembangan pariwisata di dunia akan turut dianalisis dan apabila memungkinkan dapat dijadikan sebagai preseden.
- e. Candi Borobudur itu sendiri telah mencapai kapasitas maksimalnya dalam menampung wisatawan. Melalui ITMP, diharapkan atraksi baru disekitarnya dapat berkembang dengan optimal sehingga dapat memecah jumlah wisatawan yang telah melewati batas maksimal kapasitas Candi Borobudur.

### C. SESI DISKUSI :

1. **Bapak Arif Rahman; Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata; Bidang Koordinasi Infrastruktur; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**
  - a. Borobudur hanya merupakan simbol yang digunakan untuk mendukung pengembangan wilayah yang lebih luas. Sebaiknya dalam melakukan pengembangan wilayah, dapat turut mempertimbangkan daerah yang lebih luas agar hasilnya lebih komprehensif.
  - b. Jumlah wisatawan yang ada telah memberikan beban untuk Borobudur, oleh karena itu akan diciptakan daya tarik baru di daerah lain di luar Borobudur untuk mengurai kepadatan wisatawan.
  - c. *Master plan* yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan pergerakan jumlah wisatawan yang ada tersebut, termasuk jalur pintu masuk dan keluarnya (Bandara Adisucipto, Adi Sumarmo, Stasiun, dll).
2. **Bapak Febri; Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah; Direktorat Jenderal Bina Marga**

Terkait fasilitas jalan daerah, terdapat program hibah jalan nasional, yang mencakup tujuh KSPN, salah satunya adalah Borobudur. Studi ini bisa saling mendukung dengan program tersebut.
3. **Bapak Iwan; Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Kementerian PUPR**
  - a. Apabila dilihat dari segi fisik, Borobudur sudah cukup *developed*. Peran swasta sudah tinggi, infrastruktur sudah memadai, hotel dan event sudah banyak. Hal yang perlu ditingkatkan adalah sistem pengelolaannya.
  - b. Perencanaan yang terintegrasi berbicara tentang pengembangan wilayah yang lebih luas, sehingga dalam melaksanakan pengembangan harus mengembangkan wilayah di luar (Borobudur) juga. Hal ini dapat meningkatkan variasi pariwisata yang selanjutnya akan berkontribusi pada penambahan kunjungan wisatawan di suatu wilayah.
  - c. Maksud dari terintegrasi adalah tidak hanya terintegrasi pada segi pembangunan dan pengembangan fisik namun juga perlu secara pengelolaan. Perlu dipisahkan, mana yang fokus pada pembangunan infrastruktur, mana yang fokus pada pengelolaan (manajemen) pariwisata.
4. **Perwakilan Badan Otorita Borobudur**
  - a. Badan Otorita Borobudur menekankan bahwa destinasi unggulan di Jawa Tengah ada banyak sekali, antara lain Karimun Jawa, Parangtritis, Dieng, Sarangan. Masing-masing destinasi tersebut memiliki tema dan atraksi yang sangat berbeda, misalnya nuansa bahari, pegunungan, kota baru, manusia purba, geopark.
  - b. Arah pengembangan destinasi unggulan tersebut sudah diakomodasi dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Kawasan Borobudur. Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, kegiatan ini harus mengacu pada dokumen tersebut untuk mendukung pengembangan pariwisata di beberapa lokasi yaitu:
    - i. DPN Semarang-Karimun Jawa Dsk.;
    - ii. DPN Solo-Sangiran Dsk.; dan
    - iii. DPN Borobudur-Jogjakarta Dsk.
5. **Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang**
  - a. Pengembangan pariwisata Borobudur berdampak langsung ke masyarakat Kabupaten Magelang, namun kemiskinan masih menjadi permasalahan utama. Kecamatan Borobudur sendiri masuk kedalam lima kecamatan termiskin di Kabupaten Magelang. Kedepannya, diharapkan Pariwisata Borobudur dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan untuk menuntaskan kemiskinan di daerah/kecamatanannya sendiri.

- b. Pada tahun 2016-2017, Kementerian PUPR memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang. Diharapkan pembangunan dapat terus meningkat dan dilakukan pembangunan pada daerah lainnya juga karena wisata di Kabupaten Magelang bukan hanya Borobudur.
- c. Telah ada euforia masyarakat untuk mengembangkan pariwisata serta inisiasi untuk mengembangkan lokasi pariwisata baru yang bisa mendukung tujuan pembangunan pariwisata lebih luas. Variasi kegiatan sejauh ini sudah terus berjalan dan mendukung keberlanjutan pariwisata.

**6. Bapak Ir. Hadi Sucahyono, MPP, M.Sc., Ph.D.; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kementerian PUPR**

- a. Dalam melakukan kegiatan ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, BPIW menggunakan pendekatan kewilayahan. Contohnya adalah sebelum menentukan *tourism key priority areas*, dilakukan identifikasi wilayah yang lebih luas yaitu Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar).
- b. Kami akan melakukan pertemuan rutin, penilaian pekerjaan, dan mengulas kebijakan yang tumpang tindih.

**7. Bapak George Soraya, World Bank**

ToR disusun secara bersama-sama sehingga delineasi sudah disampaikan oleh berbagai pihak, dimana Bank Dunia tidak menambahkan ataupun mengurangi luasan delineasi kawasan yang dikembangkan. Kegiatan ITMP ini merupakan milik Pemerintah sehingga Bank Dunia tidak memiliki kepentingan apapun terkait penyusunannya. Kesepakatan mengenai luasan delineasi dapat disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik dalam lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta

**8. Ibu Dayu Nirma Amurwanti, World Bank**

Diharapkan dalam Tim Konsultan ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sudah terdapat spesialis terkait ESMF.